

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pendidikan memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan. Makna penting pendidikan ini telah menjadi kesepakatan yang luas dari setiap elemen masyarakat. Pendidikan sendiri menurut John Dewey adalah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia.<sup>1</sup> Melalui pendidikanlah maju mundurnya suatu negara dapat diukur. Sebagai contoh, negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Singapura, Korea Selatan, Perancis dan Inggris yang memiliki sistem pendidikan sedemikian kokoh. Dengan sistem pendidikan yang kokoh ini dan dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, negara-negara tersebut menjelma menjadi negara yang siap berkompetisi dalam kompetisi global. Sementara itu Barack Obama mengatakan bahwa sebuah pendidikan yang baik adalah yang kritis untuk menghidupkan mimpi seseorang.<sup>2</sup>

Pendidikan di Indonesia secara konstitusional dan secara kokoh tertuang dalam UUD 1945 pasal 28 C ayat 1 yang berbunyi,

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu

---

<sup>1</sup> Masnur Muslich, *Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional* (Jakarta : Bumi Aksara. 2011), h. 67.

<sup>2</sup> Barack Obama, *Kami Yakin Bisa Berubah* (Jakarta : Ufuk Press. 2009), h. 63.

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.<sup>3</sup>

Selain pasal tersebut juga yang tertuang dalam pasal 31 ayat 1 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan ayat 2 yang berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayanya.<sup>4</sup> Secara tertulis sudah sangat jelas arahan pendidikan kita, namun masih banyak permasalahan yang menghambat amanat konstitusi ini berjalan sepenuhnya, baik secara sarana maupun prasarana kepada seluruh warga negara Indonesia.

Pendidikan di Indonesia bukan hanya mencetak generasi yang cerdas, tetapi juga menciptakan manusia-manusia yang berkarakter dan bermartabat, bukan hanya kuat dalam membentuk *life skill* atau kemampuan kerja nyata namun juga menciptakan generasi yang cakap perilakunya dan mempunyai nilai-nilai keteladanan dalam bermasyarakat, seperti meningkatkan generasi bangsa yang siap secara kompetensi untuk terjun dalam dunia kerja, dan yang tidak dapat dikesampingkan menciptakan generasi bangsa yang dapat bermasyarakat dengan baik, penuh kerukunan, dan tenggang rasa yang erat. Pendidikan yang telah disebutkan diatas merupakan dasar dalam menerapkan situasi pendidikan yang sebenarnya, sebagaimana yang tersirat dalam UU Sisdiknas pada pasal 3 yang berbunyi,

---

<sup>3</sup> Sekretariat Jendral MPR RI, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia* (Jakarta : Sekjend MPR, 2011), h. 163.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 175.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.<sup>5</sup>

Dari fungsi dan tujuan yang tercantum pada pasal 3 UU Sisdiknas tersebut telah dapat disimpulkan, bahwa pendidikan Indonesia tidak hanya sampai pada merubah seseorang yang tidak tahu menjadi tahu dalam aspek ilmu pengetahuan, tetapi juga ikut serta dalam mendidik seseorang menjadi manusia yang berkarakter dan bermartabat, akal dan budi pekertinya.

Melihat pentingnya pendidikan bagi suatu bangsa, maka seharusnya segenap elemen bangsa Indonesia secara bersama-sama ikut serta dalam menyukseskan tujuan pendidikan Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan segenap bangsa dalam menghadapi tantangan global. Pemerintah dalam programnya membangun sarana sekolah yaitu membangun sekolah-sekolah negeri dari tingkatan SD hingga SMA yang menyebar diseluruh wilayah Indonesia. Selain pihak pemerintah, masyarakat ataupun organisasi kemasyarakatan yang berbentuk yayasan seperti Sekolah Muhammadiyah, Sekolah Al-Azhar, Sekolah Darunajjah, Sekolah BPK Penabur, Sekolah Yadika dan lainnya. Sekolah-sekolah tersebut seperti contohnya Muhammadiyah sebagai sekolah dengan latar belakang keagamaan, menjelma menjadi sekolah yang juga memprioritaskan atau menitikberatkan aspek

---

<sup>5</sup> Sekretariat Jendral DEPAG RI, *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan* (Jakarta : DEPAG RI, 2006), h. 8.

pendidikannya pada ranah keagamaan. Tentunya sekolah non negeri ataupun diluar pemerintah ini memiliki kekhasannya, seperti sekolah dibawah yayasan organisasi kemasyarakatan agama ini membawa nilai-nilai rohani agama tersebut.

Selain yayasan ormas keagamaan tersebut, ada juga yayasan yang didirikan oleh persatuan istri tentara TNI AD, yang yayasannya bernama Kartika Jaya. Sekolah Kartika berada di berbagai tempat, salah satunya adalah Sekolah SMA Kartika X-1 yang berada di Kodam, Bintaro Jaya. Sekolah ini berada dibawah yayasan yang lekat dengan militer, tentu ada beberapa nilai kemiliteran yang melekat pada sekolah ini. Militer dikenal dengan nilai kedisiplinannya yang kental, dan tidak menutup kemungkinan sekolah ini juga kental dengan nilai kedisiplinan tersebut, selain juga tidak melupakan tujuan awal pendidikan yaitu mencerdaskan peserta didiknya dalam aspek ilmu pengetahuan seperti yang telah dikemukakan diawal, yang tertulis pada UU Sisdiknas pasal 3.

Nilai-nilai karakter bangsa yang memudar, inilah yang menyebabkan digalakkannya penanaman pendidikan karakter bagi segenap peserta didik. Seiring banyaknya permasalahan bangsa yang terjadi yang berawal dari hilangnya nilai-nilai karakter tersebut. Pendidikan menjelma menjadi permasalahan yang keberhailannya harus dilakukan secara serentak dan bersama-sama, bukan lagi menjadi tugas guru, kepala sekolah, atau Menteri Pendidikan saja namun juga menjadi tanggungjawab bersama seluruh bangsa Indonesia, dimana permasalahan yang menjelma itu seperti :

Seperti contoh, peserta didik di Indonesia sudah terlampau mengakrabkan diri pada bocoran UN, penggunaan zat obat-obatan terlarang atau narkoba,

kekerasan antar peserta didik atau tawuran, seks bebas dan masih banyak lagi. Sekolah yang semestinya memberikan harapan dan optimisme malah menjadikan anak didik trauma dan putus harapan, bahkan sampai bunuh diri. Ada seorang anak SD sampai bunuh diri karena merasa malu belum melunasi pembayaran buku pelajaran. Di tempat lain ditemukan sepasang remaja yang tega membuang bayi akibat hubungan gelap. Belum lagi membaca seputar maraknya tawuran pelajar, yang terakhir adalah siswa korban *smack down* yang jiwanya melayang sia-sia karena permainan dan tontonan kekerasan yang disuguhkan televisi pada masyarakat kita.<sup>6</sup>

Pada kasus-kasus yang terjadi diatas, bukan hanya aturan-aturan atau tata tertib sekolah yang dilanggar oleh peserta didik, namun juga melanggar nilai-nilai atau aturan yang berlaku dalam masyarakat ataupun hukum. Sekolah sebagai lembaga yang secara sah mendidik peserta didik secara formal memiliki tugas yang sangat penting. Selain melakukan pengawasan terhadap peserta didik, sekolah juga memegang peranan penting dalam membangun karakter atau kepribadian peserta didik.

Melalui peraturan yang ada atau tata tertib disekolah, sekolah harus menegakkan aturan atau tata tertib tersebut, sehingga menumbuhkan rasa tanggungjawab dan disiplin peserta didik. Tata tertib yang telah disepakati dan harus dijalankan oleh para peserta didik semestinya dilakukan dengan penuh kesadaran, namun terkadang peraturan yang harus ditaati itu dilanggar oleh peserta didik, disinilah menimbulkan banyak pertanyaan, apakah peraturan tersebut yang memberatkan atau belum tumbuhnya rasa kedisiplinan yang mendalam dari peserta didik.

Dalam lingkup pendidikan, kedisiplinan di dalam sekolah menjaga keteraturan dan ketertiban sehingga tata hidup antarmanusia menjadi lebih dalam. Manusia

---

<sup>6</sup> Doni Koesoema A, *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global* (Jakarta : Grasindo, 2010), h. 114.

menjadi tertata bukan sekadar karena aturan dari luar yang mengatur kebebasan mereka, melainkan pengaturan itu menjadi sarana bagi dirinya menghayati kebebasannya. Peraturan dalam sekolah menjadi latihan dalam melaksanakan nilai-nilai idealis tentang tata tertib hidup bersama itu.<sup>7</sup>

SMA Kartika X-1 Kodam, Bintaro. Sekolah dibawah yayasan Persit (persatuan istri tentara) Kartika Jaya cabang Jayakarta, Kodam Jaya memiliki 20 buah sekolah TK, 6 buah SD, 2 buah SMP, satu buah SMA dan 2 buah SMK. Sekolah dengan latar belakang yayasan militer ini mempunyai prinsip-prinsip yang tak lepas dari nilai kemiliterannya, sehingga sekolah ini menggunakan nilai-nilai militer pada pelaksanaan tata tertib disekolah ini yang kita kenal dengan prinsip yang keras dan tegas.

Kedisiplinan menjadi garda terdepan dalam pembinaan karakter bagi peserta didiknya. Salah satu nilai-nilai yang perlu diajarkan pada anak menurut Sukanto adalah disiplin dan moderasi.<sup>8</sup> Atas dasar inilah penelitian dilakukan, bagaimana penerapan tata tertib sekolah yang berlatar belakang yayasan militer. Nilai kedisiplinan terhadap tata tertib inilah yang perlu diajarkan secara dini, karena untuk mematangkan peserta didik dalam menempuh kehidupannya dilingkungannya. Secara langsung ketika peserta didik berada disuatu lingkungan maka sudah terikat dengan peraturan atau tata tertib yang berlaku di lingkungan tersebut, bila peserta didik sudah terbiasa pada tata tertib dan ada rasa untuk patuh pada tata tertib maka secara tidak langsung menciptakan manusia yang punya karakter yang kuat dalam menjawab tantangan global. SMA Kartika menjadi pilihan sebagai tempat penelitian karena

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 235.

<sup>8</sup> Masnur Muslich. *Op.Cit*, h. 79.

sekolah ini berasal dari yayasan militer, dan apakah prinsip atau nilai militer dalam pelaksanaan tata tertib di sekolah ini berjalan dengan baik, lalu dinamika apa yang terjadi mengingat sekolah ini merupakan sekolah umum, hanya saja berada dibawah yayasan militer. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

### **B. Identifikasi Masalah**

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi kedisiplinan peserta didik?
2. Bagaimana cara meningkatkan kedisiplinan peserta didik?
3. Bagaimana penerapan atau pelaksanaan tata tertib di sekolah berlatar belakang yayasan militer?
4. Adakah pengaruh sekolah dibawah yayasan militer terhadap kedisiplinan peserta didik?
5. Nilai-nilai militer apa saja yang digunakan dalam pelaksanaan tata tertib sekolah?
6. Siapakah yang bertanggungjawab pada pelaksanaan tata tertib di sekolah?

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan tata tertib pada peserta didik di sekolah berlatar belakang yayasan militer?

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka perumusan masalah adalah : Bagaimana pelaksanaan tata tertib di sekolah yayasan militer dan bagaimana pelaksanaan tata tertib sekolah dilihat dari 7 komponen rencana disiplin proaktif?

### **E. Kegunaan Penelitian**

Sekolah :

1. Mengetahui tingkatan kedisiplinan peserta didik
2. Sebagai masukan untuk meningkatkan kedisiplinan peserta didik
3. Sebagai masukan sekolah yang lain untuk meningkatkan kedisiplinan peserta didik

Peserta didik :

1. Meningkatkan kedisiplinan sebagai tanggungjawabnya kepada dirinya dan orang tua
2. Mengetahui arti pentingnya kedisiplinan yang diterapkan pada dirinya

Peneliti:

1. Mengetahui langkah-langkah dalam menciptakan kedisiplinan peserta didik
2. Mengetahui permasalahan-permasalahan dalam mendidik peserta didik
3. Sebagai acuan dan pengalaman di lapangan secara langsung melihat tingkat kedisiplinan peserta didik